

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA
TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI INDONESIA**

(Studi Putusan No. 370/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL)

UNIVERSITAS ANDALAS
STUDI KASUS

Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Andalas Untuk Melengkapi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH

NAMA : PUTRA FAJAR BONAVENTURA SIREGAR

BP : 1410111102

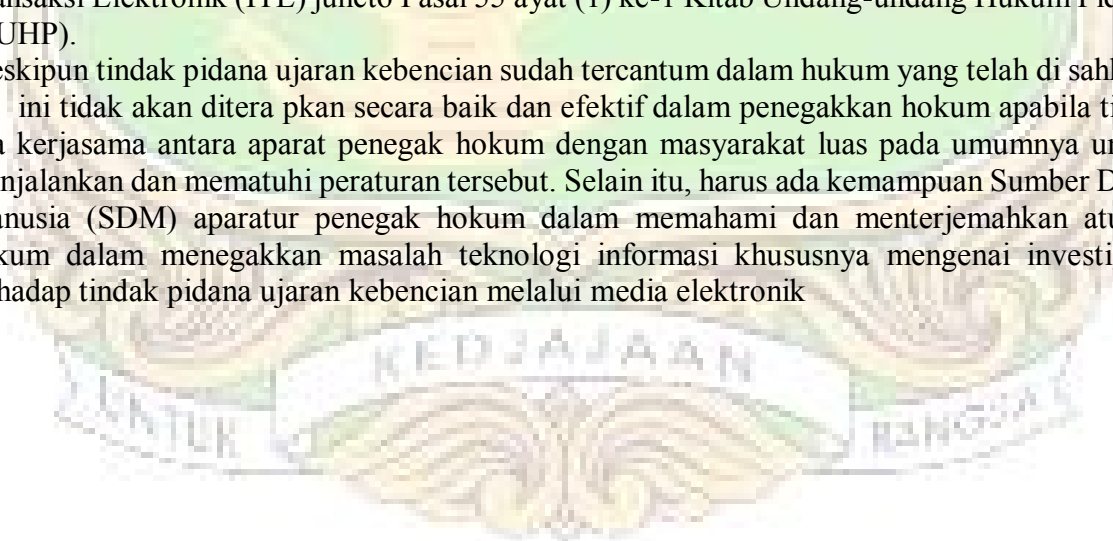
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2020

ABSTRAK

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesamanya setiap saat. Interaksi ini tentunya tercipta melalui komunikasi yang baik antar manusia itu sendiri, salah satunya adalah ujaran kebencian. Masalah ujaran kebencian atau *hate speech* dan SARA merupakan masalah lama yang tidak dapat ditanggulangi oleh ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di singkat KUHP. Persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian masyarakat pada akhir-akhir ini, salah satunya adalah kasus Ahmad Dhani terkait ujaran kebencian yang telah diputus pada perkara Putusan No. 370/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL. Adapun rumusan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pertanggungjawaban pidana dari terdakwa untuk kasus Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL yang di adili Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana ujaran kebencian pada putusan No. 370/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL? dengan memakai metode penelitian analisis yuridis. Hasil dari penelitian yuridis penulis, Pertama, Pertanggungjawaban pidana dari terdakwa untuk kasus Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL yang di adili Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang ujaran kebencian (*hate speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), kemudian Pasal 28 *juncto* Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan etnis. Kedua, Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana ujaran kebencian pada putusan No. 370/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL, berdasarkan terdakwa Ahmad Dhani berdasarkan atas 3 cuitan yang dilontarkan di media sosial Twitter pribadinya yang melakukan tindak pidana ujaran kebencian. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Ahmad Dhani itu dengan Pasal 45A ayat (2) *juncto* Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Meskipun tindak pidana ujaran kebencian sudah tercantum dalam hukum yang telah di sahkan, hal ini tidak akan ditera pkan secara baik dan efektif dalam penegakkan hokum apabila tidak ada kerjasama antara aparat penegak hokum dengan masyarakat luas pada umumnya untuk menjalankan dan mematuhi peraturan tersebut. Selain itu, harus ada kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur penegak hokum dalam memahami dan menterjemahkan aturan hokum dalam menegakkan masalah teknologi informasi khususnya mengenai investigasi terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media elektronik



ABSTRACT

Humans are social creatures who always interact with each other all the time. This interaction is certainly created through good communication between humans themselves, one of which is an expression of hatred. The issue of hate speech and SARA is an old problem that cannot be overcome by the provisions contained in the Criminal Law Code which is briefly the Criminal Code. The issue of hate speech has been gaining more attention from the public lately, the only case is Ahmad Dhani's case related to hate speech which has been decided in the case of Decision No. 370 / Pid.Sus / 2018 / PN JKT.SEL. The formulation in this study is: How is the criminal liability of the defendant for case Number 370 / Pid.Sus / 2018 / PN JKT.SEL which was tried by the South Jakarta District Court? What is the basis of the judge's judgment in imposing a crime on the perpetrators of a crime of hate speech in decision No. 370 / Pid.Sus / 2018 / PN JKT.SEL? by using juridical analysis research methods. The results of the author's juridical research, First, the criminal liability of the defendant for the case Number 370 / Pid.Sus / 2018 / PN JKT.SEL which was tried by the South Jakarta District Court are the Articles that regulate the actions of hate speech against someone, groups or institutions based on the Circular of the National Police Chief No: SE / 06 / X / 2015 are contained in Article 156, Article 157, Article 310, Article 311 of the Criminal Code (KUHP), then Article 28 in conjunction with Article 45 paragraph (2) Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Article 16 of Law Number 40 of 2008 concerning the elimination of Racial and ethnic Discrimination. Second, the basis for the judge's judgment in imposing a crime on the perpetrators of a criminal act of hate speech in decision No. 370 / Pid.Sus / 2018 / PN JKT.SEL, according to defendant Ahmad Dhani based on 3 tweets that were brought up on his personal Twitter social media who committed criminal acts of hate speech. The Public Prosecutor (JPU) charged Ahmad Dhani with Article 45A paragraph (2) juncto Article 28 paragraph 2 of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the 1st Book of Law Criminal Law (KUHP).

Although criminal acts of hate speech have been stated in the law that has been ratified, this will not be applied properly and effectively in law enforcement if there is no collaboration between law enforcement officials and the wider community in general to carry out and comply the regulation. In addition, there must be the ability of Human Resources (HR) of law enforcement agencies in understanding and translating legal regulations in upholding information technology issues, especially regarding investigations of criminal acts of hate speech through electronic media.

